

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dibahas dalam studi ini menyimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Parlemen Di Indonesia Pasca Amandemen ke-3 UUD 1945 Pasal 22 belum tegas dan masih mengandung multitafsir atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 mengenai kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.. Akibat hal tersebut Dewan Perwakilan Daerah belum mendapatkan *bargaining position* pada saat pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perwakilan-perwakilannya. Dalam Pasal tersebut Dewan Perwakilan Daerah hanya dapat sebatas mengajukan Rancangan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, namun tidak ikut serta dalam pengambilan putusan Rancangan Undang-Undang tersebut. Sehingga perlu dilakukannya amandemen kelima.
2. Kajian Siyasah telah memberikan aturan agar Dewan Perwakilan Daerah bisa seperti *Ahlul Halli Wall- 'Aqdi* yang memiliki kewenangan sebagai dewan pengawas dalam proses hingga sampai pada pengawasan dan implementasinya untuk kemaslahatan bangsa. Ini artinya terputusnya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia belum sejalan dengan konsep hukum tatanegara dalam perspektif Islam terhadap jalannya pemerintahan berdasarkan nilai nilai dalam Nash sehingga anggota Dewan Perwakilan Daerah ataupun Dewan lainnya dapat betul-betul menjalani apa yang diamanatkan oleh rakyat.

B. REKOMENDASI

1. Upaya mengokohkan eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Parlemen Di Indonesia Pasca Amandemen ke-3 UUD 1945 Pasal 22 diperlukan ketegasan dan meminimalisir multitafsir atas Pasal tersebut, sehingga Dewan Perwakilan Daerah memiliki *bargaining position* pada saat pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perwakilan-perwakilannya.

2. Dewan Perwakilan Daerah dapat dibangun seperti konsep *Ahlul Halli Waal-'Aqdi* pada sisi kewenangan pengawasan tak terbatas terhadap jalannya pemerintahan dan seperti konsep *al sulthah al-tashri'iyah* dari aspek proses dan aktifitas kerja kelembagaan .

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Asshiddiqie Jimly. 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.

Asshiddiqie Jimly.2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid II. Sekjend Dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.

—————, 2006. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Pres.

Al-Mawardi,2000, *Al-Ahkaamus Sulthaaniyyahwal Wilayatud Diiniyyah*, Terj.Abdul Hayyieal-Kattani, Kamaludin Nurdin,Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam,Jakarta: Gema Insani Press.

Arfan Abbas, *Fiqh Al-Siyasah Al-Jabiri: Analisis Kitab Al-'Aql Al-Siyasi Al-Arabi*, [Www.Researchgate.Net/Publication](http://www.Researchgate.Net/Publication)

—————, 1960 *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayatu Al-Diniyyah*. Beirut: Darul Fikr.

Arifin Firmansyah, Dkk, 2005. *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta; Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN),MK Republik Indonesia (MKRI).

A.M. Fatwa, 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta:Kompas Penerbit.

Abdulkarim Aim, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung : Grafindo Media Pratama.

Al Atok, A. Rosyid, 2015, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang : Setara Press.

Amin Rahman, 2019, *Pengantar Hokum Indonesia* Jogjakarta : Deapublish.

Bahar Saafroedin Dan A.B Tangadililing, 1999, *Integrasi Nasional: Teori, Masalah Dan Strategi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Boa,Fais Yonas, 2018, *UUD 1945, MPR Dan Keniscayaan Amandemen: Terkait Kewenangan Konstitutif MPR Dan Kebutuhan Amandemen Kelima UUD 1945*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

- Budianto Kun, 2017, *Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitui, Legislasi, Demokrasi, Ummah Dan Syuro*, JSSP, Vol. 1 No. 2.
- BPKKRI. 2016. *Menakar Arah Amandemen UUD 1945*; Dewan Perwakilan Daerah: Jakarta. *Laporan Kinerja Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI Masa Bakti 2014-2015*. DPD RI: Jakarta. DPD RI. 2016. Jakarta. Efriza. 2014. *Studi Parlemen : Sejarah. Konsep Dan Lanskap Politik Indonesia*. Setara Press: Malang.
- Dewan Perwakilan Daerah, Tt, *Buku Catatan Tahunan Kinerja Komite II DPD RI*. Jakarta : Komite II DPD RI.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Perwakilan Daerah Indonesia, *Sekilas Mengenal Dan Memahami DPD RI*, Jakarta : Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2006.
- Emmerson, Donald K. 2015. *Indonesia Beyond Suharto: Polity, Economy, Society Transition*, London: Roudledge.
- Farid Abdul Khaliq, 2005, *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Group.
- Ferrazzi. 2002. *Fiscal Decentralization In Indonesia: A Comment On Smoke and Lewis*. Word Development.
- Fuady Munir, 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Fadjar, A. Mukhie. 2006. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta Dan Citra Media, Yogyakarta.
- Fatwa, A.M. 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amademen UUD 1945*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Gunawan Markus, 2008, *Buku Pintar Calon Anggota Dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, DPD)*. Jakarta: Transmedia Pustakan .
- Hadjon Philipus M, 1998, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Jurnal Pro Justitia Tahun XVI Nomor I.
- Hadi Sutrisno, 1997, *Metodologi Reseach*, Cet. 29. Yogyakarta: Andi Offset.
- Harman, Benny K. & Hendardi, Ed., 1991, *Konstitusionalisme Peran DPR Dan Judicial Review*, JARIM Dan YLBHI, Jakarta.

- Hartono Dimiyati, 2009. *Problematika Dan Solusi Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Gramedia.
- Harahap Krisna, 2004, *Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*, PT Grafitri Budi Utami, Jakarta.
- Harun, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Tinjauan Hukum Islam, Jurnal*. Diakses Dari Publikasiilmiah.Ums.Ac.Id.
- Harman Budi, 2011, *Filsafat Fragmentaris: Deskripsi, Kritik, Dan Dekonstruksi*, Jogjakarta: Kanisius.
- Hetta, Manbayu, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd Tahun 2009 Di Kota Payakumbuh)*. Masters Thesis, Universitas Andalas.
- Huda Ni'matu, 2007, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Iqbal Muhammad Dan Nasution, Amien Husein. 2010, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibrahim Johnny, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrayana Denny, 2007, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos Dan Pembongkaran*, Bandung: Mizan.
- Isra Saidi, 2006, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Padang: Andalas Universty Press.
- Iqbal, Muhammad. 1997, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jie, Rawwas Qal'ah, 1996 M.. *Mu'jâm Lughâtal-Fuqahâ'*, Beirut: Dar An-Nafais.
- Janedjri M Ghaffar Dkk, (Edt.), 2003, *DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Sekretariat Jenderal MPR Dan UNDP*, Jakarta.
- James R. Rogers. Bicameral Sequence: Theory And State Legislative Evidence. *American Journal Of Political Science*. Vol. 42, No. 4 Oct., 1998.
- JF**. 2009, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Perubahan Pertama Sampai Dengan Keempat Dalam Satu Naskah*, Yogyakarta: New Merah Putih.

- Kantaprawira Rusadi, 2011, *Hukum Dan Kekuasaan*, Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia.
- Khaliq, Farid Abdul,2006, *Fiqh Siyasa* Cet I,Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada.
- Khan, Qomaruddin. 2000. *Almawardi's Teory Of The Stte*, Terjemah Imron Royid. *Kekuasaan, Pengkhianatan Dan Otoritas Negara: Telaah Kritis Teori Al-Mawardhi Tentang Negara*, Jogjakarta: Tiara Wacana Jogja.
- Kholiq, Farid Abdul, 2005, *Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syuraal- 'Adl Al-Musawah*,Terj.Faturrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah.
- Marijan Kacung, 2011, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru*,Jakarta: Kencana.
- Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara 1*, Yogyakarta: FH UII.
- Mastur, 2017.Disertasi, *Rekonstruksi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Berbasis Penguatan Sistem Bikameral*. Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Miriam Budiardjo, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyosudarmo Suwoto, 2000, *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- MD, [Moh Mahfud](#), 2000, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moeljono, Djoko Santoso.2011, *13 Konsep Beyond Leadership*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Manan, Bagir. 2003, *Teori Dan Poli'tik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Megawati Dan Murtopo, Ali. 2006, *Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraanindonesia*, Sebuah Evaluasi. Yogyakarta: UAD Press.
- Manan Abdul,2018, *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum, Cet Ke-1*, Surabaya: STIH"IBLAM.

- Naja, H.R. Daeng, *Dewan Perwakilan Daerah :Bicameral Setengah Hati*, Media Pressindo: Yogyakarta.
- Nadir, *Otonomi Daerah dan desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, *Jurnal politik profetik*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.
- Perubahan Undang-Undang Dasar Antara Harapan Dan Kenyataan*, Diakses Dari [Http://Ditjenpp.Kemenkumham.Go.Id](http://Ditjenpp.Kemenkumham.Go.Id).
- Pasal 22 D *Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen*, Yogyakarta: New Merah Putih: 2009.
- Purnama Eddy, 1983, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Negara-Negara Lain*, Nusa Media, Malang, 2007. Lihat Juga, Abu Daud Busroh Dan Abu Bakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta,.
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Pidato Sambutan Di Depan Peserta Kursus Singkat Angkatan Ke-14 Lembaga Ketahanan Nasional Di Istana Negara Tanggal 6 Juli 2006, *Dekrit Bukan Solusi*, Kompas, 7 Juli 2006.
- M Zainor Ridho, "Eksistensi DPD" Dalam Jurnal Al-Ahkam, (Jurnal Hukum, Sosial Dan Keagamaan), Serang, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Vol 4 No 1, 2016,
- Rusbiantoro Dadang, 2020, *Bahasa Dekonstruksi Ala Foucault Dan Derrida*, Jogjakarta: Tiara Wacana.
- Rahman Hasanudin, 2004, *Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Setengah Hati*, Jogjakarta: Media Presindo.
- Rogers James R, 1998, *Bicameral Sequence: Theory And State Legislative Evidence. American Journal Of Political Science. Vol. 42, No. 4.*
- Saepul Muhamad Akbar. 2019, *Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Program Legislasi Nasional : Suatu Kajian Terhadap Peran DPD Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Provinsi Jawa Barat*, Tesis.
- Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat desa*, *Jurnal politik profetik*.
- Suhendra Adi Dan Ray Ferza, 2015, *Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Bingkai Bikameralisme*, *Jurnal Dimensi*, Vol 8, No 2.
- Sulaiman King Faisal, 2013, *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

- Soekanto Soerjono Dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Siregar Eddie, Et El, 2014, *Buku Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Sundari Sri, *Koordinasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat*. Dalam Jurnal *Transparansi* 41 Vol. 1, No. 1, Juni 2018.
- Smith Edward Conrad And Zurcher Arnold John. 2013, *A Dictionary Of American Politics*, America: Barnes And Noble Inc, New York.
- M D, Moh Mahfud. 2000, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sekretariat Jenderal MPR Dengan UNDP, 2003, *Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia*.
- Suharti Eni, 2014, *MD3 UU RI No. Tahun 2014 MPR, DPR, DPD, DPRD*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanuredjo Budiman, *Konstitusi Di Tengah Tarikan Kepentingan*, Dalam *Kompas*, 7 Maret 2007.
- Tutik Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.
- Tambunan ASS, 1991, *MPR Perkembangan Dan Pertumbuhan: Suatu Pengamatan Dan Analisis*, (Jakarta: Sinar Harapan).
- Ulya Zaki, 2016, *Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Segi Kemandirian Lembaga dalam sistem Bikameral*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* volume 11, Nomor 2.
- Widyatma Zulfikar Yoga, 2014, Dalam *Journal*, *Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi*.
- Wira Atma Hajri, Et Al. 2017, *Living Constitution Cara Menghidupkan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali.
- Yessi Siregar Dalam Tesisnya Berjudul *Analisis Penyusunan Kebijakan Daftar Pemilih Tet Ap (Dpt) Pada Pemilu Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd Di Komisipemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Tapanuli Sela Tan Tahun 2014* Universitas Medan 2014.

Yusa, I Gede Dkk,2016, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD RI 1945*, Malang : Setara Press.

Internet

Iman Santoso, *Perubahan Undang-Undang Dasar Antara Harapan Dan Kenyataan*”
[Http://Ditjenpp.Kemenkumham.Go.Id/Htn-Dan-Puu/685](http://Ditjenpp.Kemenkumham.Go.Id/Htn-Dan-Puu/685)

Www. Kompas.Com

Repository.Upi.Edu

Www.Jurnalponsel.Com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Eka Cahya Wardhani
Tempat/Tgl Lahir : Banding Agung, 20 April 1996
NIM : 1801022043
Alamat Rumah : Perumahan Pt Hindoli Estate Srigunung Kec. Sunagi Lilin
Kab. Muba.
No Hp : 0853 8102 4996

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Hendi Alponso
2. Ibu : Muji Yanti

C. Nama Saudara : 1. Suci Cahya Ningsih
2. Satrio Wijaya Kusuma

D. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Karyawan Swasta
2. Ibu : Karyawan Swasta

E. Riwayat pendidikan

1. SD : SDN 107 OKU 2007
2. SMP : SMP Nusa Serasan 2010
3. SMA : SMAN 1 Banding Agung 2014
4. S1 : Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Fatah Palembang 2018
5. S2 : Hukum Tata Negara UIN Raden Fatah Palembang 2021

Palembang, 9 maret 2021

Eka Cahya Wardhani
NIM. 1801022043

